

Laporan Keuangan Tahunan (Audited) 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

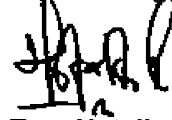
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN adalah salah satu entitas akuntansi di bawah KOMISI PEMILIHAN UMUM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pariaman, 24 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Tres Natalia Situmorang, SH

NIP. 19841203 200902 2 012

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pariaman, 24 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Tess Natalia Situmorang, SH

NRP. 19841203 200902 2 012

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.700.207 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp26.700.207 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.336.303.146 atau mencapai 0,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.962.303.178 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp3.962.303.178 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.962.303.178

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.524.268.303 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-4.524.268.303, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp26.700.207 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-4.497.568.096.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp4.140.151.318, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-4.497.568.096 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 4.309.602.939 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp3.952.186.161

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
3	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
4	Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
5	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
6	Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022
8	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
9	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
10	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022
11	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
12	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
15	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
16	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
17	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
18	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
19	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
20	Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
21	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
22	Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
23	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
24	Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
25	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
26	Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
27	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
28	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
29	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
30	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
32	Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
33	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
34	Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
35	Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
36	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jkg Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
37	Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022
38	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2022
39	Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2022
40	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
41	Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
42	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
43	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
44	Rincian Liabilitas Yang Belum Ditangguhkan

- 46 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut
- 47 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut
- 48 Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :
- 49 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut
- 50 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 51 Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 52 Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 53 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 54 Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 55 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2022
- 56 dan 2021
- 57 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 58 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 59 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 60 Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021
- 61 Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022
- 62 dan 2021
- 63 Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021
- 64 Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021
- 65 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
- 66 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2022
- 67 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022
- 68 Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022
- 69 Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022
- 70 Rincian Transfer Keluar Tahun 2022
- 71 Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	MON SAKTI SEMESTER I TA 2022
LAMPIRAN	II	GLP SAKTI SEMESTER 1 TA 2022
LAMPIRAN	III	E REKON TAHUN 2021
LAMPIRAN	IV	PERSEDIAAN SEMESTER II TA 2022
LAMPIRAN	V	ASET TETAP SEMESTER II TA 2022
LAMPIRAN	VI	BA REKONSILIASI DAN SEMESTER 2 TA 2022

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	26.700.207	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	26.700.207	-	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	2.553.254.262	-	2.279.782.441
Belanja Barang	B.2.2	-	1.691.137.884	-	608.326.489
Belanja Modal	B.2.3	-	91.911.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		-	4.336.303.146	-	2.888.108.930

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	2.553.254.262	2.279.782.441
Beban Persediaan	D.4	12.489.700	17.202.500
Beban Barang dan Jasa	D.5	661.863.812	486.490.714
Beban Pemeliharaan	D.6	89.740.817	95.563.509
Beban Perjalanan Dinas	D.7	963.645.018	43.120.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	243.274.694	311.968.462
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		4.524.268.303	3.234.127.626
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.524.268.303)	(3.234.127.626)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	20.699.999	9.099.999
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	6.000.208	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		26.700.207	9.099.999
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(4.497.568.096)	(3.225.027.627)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(4.497.568.096)	(3.225.027.627)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	4.140.151.318	4.493.358.693
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(4.497.568.096)	(3.225.027.627)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	(41.004.913)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	(41.004.913)
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	(41.004.913)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4.309.602.939	2.879.008.931
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(187.965.157)	(387.023.609)
EKUITAS AKHIR	E.6	3.952.186.161	4.106.335.084

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

U R A I A N	Catatan	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	-	26.484.446
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	26.484.446
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.21	585.303.000	585.303.000
Tanah Belum Diregister	C.22	-	-
Peralatan dan Mesin	C.23	1.525.119.676	2.227.157.745
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.24	-	-
Gedung dan Bangunan	C.25	3.598.742.000	3.598.742.000
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.26	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.27	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.28	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.29	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.30	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.31	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.32	(1.746.861.498)	(2.297.535.873)
Jumlah Aset Tetap		3.962.303.178	4.113.666.872
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.33	-	-
Aset Tak Berwujud	C.34	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.35	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.36	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.37	-	-
Aset Lain-lain	C.38	793.949.069	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.39	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.40	(793.949.069)	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3.962.303.178	4.140.151.318
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.41	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.42	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.43	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.44	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.45	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.46	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.47	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.48	3.962.303.178	4.140.151.318
JUMLAH EKUITAS		3.962.303.178	4.140.151.318
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.962.303.178	4.140.151.318

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang tentang pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia yang terkodifikasi dalam satu naskah, karena mengatur tiga (tiga) substansi undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal Pemilu Serentak 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 September 2020. Pemilu Serentak 2020, maksudnya adalah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pada hari yang sama, waktu yang sama, dan tempat pemungutan suara yang sama. Pemilu Serentak 2020 muncul sebagai salah satu konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013, dengan tujuan memperkuat sistem presidensial, efisiensi anggaran, dan efektifitas mobilitas pemilih. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, baik di dalam maupun di luar negeri. Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc tersebut pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan 3 (tiga) paket undang-undang di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. - 2 - Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar good governance antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara. Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbaik mencerminkan pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas.

Adapun indikator kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran saat ini yaitu

- 1) kesesuaian dengan perencanaan dan anggaran,
- 2) efektifitas pelaksanaan kegiatan,
- 3) kepatuhan terhadap regulasi, dan
- 4) efisiensi pelaksanaan anggaran.

Untuk mengelola kegiatan dan anggaran Tahapan Pemilu Serentak 2020 di dalam negeri dibentuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan anggota Panitia Pemungutan Suara dibentuk dan/atau ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dibentuk dan/atau ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dibentuk dan atau ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara. Untuk mengelola kegiatan dan anggaran Tahapan Pemilu Serentak 2020 di luar negeri dibentuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Luar Negeri yaitu Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri. Panitia Pemilihan Luar Negeri dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di luar negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan perhitungan suara melalui Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, Kotak Suara Keliling, dan pos. Pada Tahun 2018 dan 2020, di samping mengelola anggaran untuk pembiayaan kegiatan reguler/rutin, Komisi Pemilihan Umum juga mengelola anggaran untuk pembiayaan kegiatan Tahapan Pemilu 2020 baik untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, maupun Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc yang berada di luar maupun dalam negeri. Biaya tersebut tertuang dalam 1 (satu) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran (BA) 076. Pada prinsipnya, pola pencairan, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun, mengingat kegiatan Tahapan Pemilu 2020 mempunyai karakteristik dan kekhasan tertentu, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2020 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum koTA Pariaman. Adapun pertimbangan karakteristik dan kekhasan kegiatan Tahapan Pemilu 2020 adalah:

1. letak geografis Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc (Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, berada jauh dengan Kuasa Pengguna Anggaran (Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh, dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota);
2. Masa bakti Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Dalam Negeri dan Luar Negeri bersifat sementara dan jangka waktunya sangat terbatas;
3. Personel Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Dalam Negeri berasal dari tokoh masyarakat, sedangkan pada Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc Luar Negeri berasal dari wakil masyarakat yang di luar negeri atau sekitar wilayah penyelenggaraan yang rata-rata belum menguasai tata kelola keuangan negara secara memadai; dan
4. Pertanggungjawaban keuangan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja induknya.

KPU Kota Pariaman berfungsi sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

1. menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
2. membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
3. menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
4. menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

5. mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
6. memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1. tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
- Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

MISI

Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

- Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
- Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
- Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh KOMISI PEMILIHAN UMUM yang merupakan entitas pelaporan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2022	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2,553,254,262	-
Belanja Barang	1,691,137,884	-
Belanja Modal	92,000,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	4,336,392,146	-

Realisasi Pendapatan
Rp26.700.207

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp26.700.207 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp6.000.000. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Terdapat Kenaikan pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak di bandingkan dengan tahun 2021 karena adanya pengembalian biaya tugas belajar salah seorang PNS Sekretariat KPU Kota Pariaman ... dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	6,000,000	-
Jumlah	-	6,000,000	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6,000,000	-	-
Jumlah	6,000,000	-	-

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA 2022 sebesar 0,00 dari TA 2021 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp26.700.207*

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing- masing sebesar Rp26.700.207 dan Rp0. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,00 dari TA 2021 Terdapat Kenaikan pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak di bandingkan dengan tahun 2021 karena adanya Pengembalian biaya Tugas Belajar . Rincian *Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,000,000	-	-
Jumlah	6,000,000	-	-

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6,000,000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	6,000,000	-	-

*Realisasi Belanja
Rp4.336.303.146*

B.2 Belanja

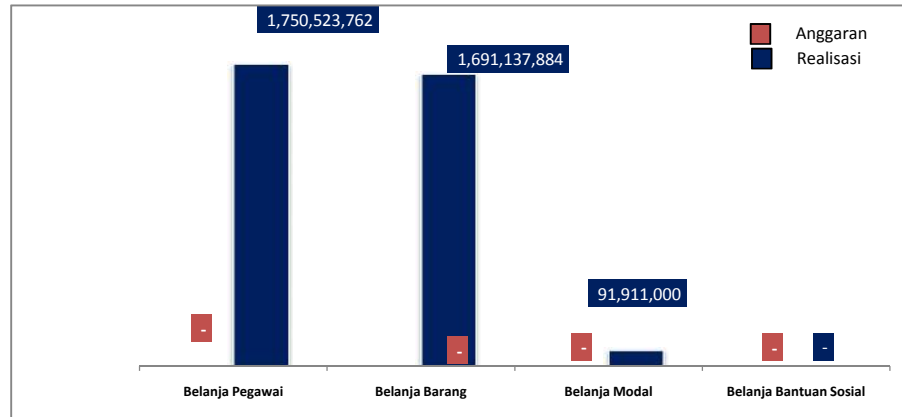
Realisasi Belanja pada TA 2022 adalah sebesar Rp4.336.303.146 atau 0,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	2,553,254,262	-
Belanja Barang	-	1,691,137,884	-
Belanja Modal	-	91,911,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	4,336,303,146	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2022



Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 22,35% Realisasi mengalami penurunan di Bandingkan tahun 2021 karena terdapat hal pokok yang mempengaruhi, yaitu, pada bulan Juni 2022 telah dimulai nya Tahapan Pemilu 2024 sehingga kegiatan terkait Pemilu meningkat . Berikut rincian realisasi belanja TA 2022 dan TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Pegawai	1,750,523,762	2,279,782,441	(23.22)
Belanja Barang	1,691,137,884	608,326,489	178.00
Belanja Modal	91,911,000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	3,533,572,646	2,888,108,930	22.35

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp2.553.254.262

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.553.254.262 dan Rp2.279.782.441. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami penurunan sebesar 23,22 % dari TA 2021. Hal ini disebabkan Penurunan belanja pegawai antara 2022 dengan 2021 di sebabkan adanya Pegawai Mutasi Pindah tempat kerja tanpa ada penggantinya

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Gaji Pokok PNS	708,081,820	594,298,280	19.15
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,514	10,774	6.87
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54,512,342	45,662,848	19.38
Belanja Tunj. Anak PNS	19,817,410	15,872,516	24.85
Belanja Tunj. Struktural PNS	53,280,000	50,040,000	6.47
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	1,713,813	1,289,650	32.89
Belanja Tunj. Beras PNS	51,635,460	44,610,720	15.75
Belanja Uang Makan PNS	118,688,000	115,625,000	2.65
Belanja Tunjangan Umum PNS	27,060,000	25,805,000	4.86
Belanja Tunjangan Profesi Guru	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	715,723,446	1,387,492,653	(48.42)
Jumlah Belanja kotor	1,750,523,805	2,280,707,441	(23.25)
Pengembalian Belanja Pegawai	43	925,000	(100.00)
Jumlah Belanja	1,750,523,762	2,279,782,441	(23.22)

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.691.137.884 dan Rp608.326.489. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 178,00% dari Realisasi TA 2021.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Belanja Barang Mengalami Kenaikan di bandingkan Tahun 2021 yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya Tahapan Pemilu sudah berjalan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Barang Operasional	174,658,211	371,847,696	(53.03)
Belanja Barang Non Operasional	387,444,325	17,161,300	2,157.66
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,489,700	17,330,500	(27.93)
Belanja Jasa	63,159,813	63,431,484	(0.43)
Belanja Pemeliharaan	89,740,817	95,435,509	(5.97)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	963,645,018	43,120,000	2,134.80
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,691,137,884	608,326,489	178.00
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,691,137,884	608,326,489	178.00

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp38.507.086 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2022

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	38,342,086	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	165,000	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja	-	38,507,086	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp91.911.000 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021 disebabkan oleh Belanja Peralatan dan mesin mengalami kenaikan pada tahun 2022 karena adanya belanja modal peralatan mesin untuk Tahapan Pemilu 2024.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,911,000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	91,911,000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	91,911,000	-	-

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada belanja tanah dan belanja modal pembuatan sertifikat tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp91.911.000 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan oleh Belanja Peralatan dan mesin mengalami kenaikan tahun 2022 karena ada belanja modal peralatan mesin untuk persiapan Pemilu 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,911,000	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	91,911,000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	91,911,000	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 Tidak ada belanja Modal gedung dan bangunan maupun Rehabilitasi gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan Tidak ada belanja modal irigasi baik tahun 2022 maupun tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan Tidak Belanja modal Lainnya .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2022 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2021. Belanja Bantuan Sosial Tidak ada belanja sosial dan penanganan pandemi covid 19 .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Rekening BRI	-	-
di brankas	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Tidak ada Kas di BP Tahun 2021 dan 2022

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak ada Kas di bendahara penerimaan

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

tidak ada kas lainnya dan setara kas TA 2022 dan Tahun 2021

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Tidak ada beban barang yang di bayar dimuka

Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

Tidak ada beban barang yang di bayar dimuka

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Keterangan	TAHUN 2022	TAHUN 2021
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

Tidak ada pendapatan yang harus di terima

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.4 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	TAHUN 2022	TAHUN 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan Rp0

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp26.484.446. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Jenis	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Barang Konsumsi	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Bahan Baku	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan barang konsumsi untuk semester 1 TA 2022 saat ini masih ada di gudang

Persediaan yang Belum Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Debitur	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2022 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

U R A I A N	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2022 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.21 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp585.303.000 dan Rp585.303.000. Nilai Tanah tersebut Tidak ada Kenaikan Nilai Tanah Tahun 2021 dan 2022. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	585,303,000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	585,303,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2022

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1200 m2	Air Santok Pariaman Timur Kota	585,303,000
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			585,303,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah tersebut menjadi KPU Kota Pariaman dan sudah bersertifikat

Tanah Belum Diregister
Rp0

Peralatan dan Mesin
Rp1.525.119.676

C.22 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.23 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.525.119.676 dan Rp2.227.157.745. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	2,227,157,745
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Penyusutan/Amortisasi Pertama Kali	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	2,227,157,745
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1,291,538,080)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	935,619,665

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Bertambahnya peralatan dan mesin
-
-
-

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.24 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp3.598.742.000

C.25 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.598.742.000 dan Rp3.598.742.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	3,598,742,000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	3,598,742,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(455,323,418)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3,143,418,582

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan
-
-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan
-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.26 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

C.27 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada Mutasi Tambah Jalan Irigasi dan Jaringan
-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan
-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.28 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.29 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Perolehan Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.30 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.31 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP muncul karena kesalahan penginputan operator terdahulu sehingga muncul KDP dan pada saat migrasi saldo awal ke Aplikasi SAKTI muncul akibat normalisasi K3 Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.746.861.498

C.32 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp1.746.861.498 dan Rp2.297.535.873. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,525,119,676	(1,291,538,080)	233,581,596
2	Gedung dan Bangunan	3,598,742,000	(455,323,418)	3,143,418,582
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		5,123,861,676	(1,746,861,498)	3,377,000,178

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.33 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud Rp0

C.34 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	-

Mutasi transaksi penambahan/penurunan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- Tidak Ada Mutasi Tambah Kurang Aset Tak Berwujud
-
-
-
-

C.35 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.36 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

C.37 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2022	T.A. 2021
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.38 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp793.949.069 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2022	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	(793,949,069)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	(793,949,069)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-	-
-	-
-	-

Mutasi Kurang

-	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.39 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp0 dan Rp0.

C.40 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp793.949.069 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	793,949,069	(793,949,069)	-
-	-	-	-
Total	793,949,069	(793,949,069)	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.41 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Tidak ada Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.42 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Tidak ada Utang yang belum ditagih Tahun 2022 dan 2022

Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0

C.43 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Tidak ada hibah yang belum disahkan Tahun 2021 dan 2022

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.44 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Tidak ada Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Pendapatan Diterima
Dimuka Rp0

C.45 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 dan 2022

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.46 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.47 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak Ada Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2021 dan 2022

Ekuitas
Rp3.962.303.178

C.48 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.962.303.178. dan Rp4.140.151.318. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Tidak ada Operasional Pajak Tahun 2021 dan 2022. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Tidak ada PNPB 2021 dan 2022 pada Satker KPU Kota Pariaman. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021	%
Penerimaan Kembali Beban Pembayaran	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun	-	-	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Pegawai Rp2.553.254.262

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.553.254.262 dan Rp2.279.782.441.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar 12,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Beban Pegawai mengalami Kenaikan dikarenakan terdapat pegawai mutasi pindah ke KPU Kota Pariaman. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Gaji Pokok PNS	708,081,820	594,298,280	19.15
Beban Pembulatan Gaji PNS	11,471	10,774	6.47
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54,512,342	45,662,848	19.38
Beban Tunj. Anak PNS	19,817,410	15,872,516	24.85
Beban Tunj. Struktural PNS	53,280,000	50,040,000	6.47
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	1,713,813	1,289,650	32.89
Beban Tunj. Beras PNS	51,635,460	44,610,720	15.75
Beban Uang Makan PNS	118,688,000	115,625,000	2.65
Beban Tunjangan Umum PNS	27,060,000	24,880,000	8.76
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	715,723,446	1,387,492,653	(48.42)
	-	-	-
Jumlah	2,553,254,262	2,279,782,441	12.00

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.489.700 dan Rp17.202.500

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 27,40 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena Terdapat Blokir pada sebagian pagu Belanja Persediaan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Persediaan konsumsi	12,489,700	17,202,500	(27.40)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
jaga	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	12,489,700.00	17,202,500	(27.40)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp661.863.812 dan Rp486.490.714.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 36,05 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Kenaikan beban barang dan jasa dikarenakan banyaknya kegiatan Tahapan Pemilu 2024 . Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Keperluan Perkantoran	22,336,100	209,197,000	(89.32)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	239,200	138,000	73.33
Beban Bahan	101,676,022	13,561,300	649.75
Beban Langganan Listrik	36,601,463	34,050,234	7.49
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,520,000	110,520,000	(13.57)
Beban Barang Operasional Lainnya	18,220,825	13,802,612	32.01
Beban Honor Output Kegiatan	118,300,000	3,600,000	3,186.11
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	38,342,086	38,190,084	0.40
Beban Barang Non Operasional Lainnya	167,303,303	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	165,000	-	-
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Beban Langganan Listrik	36,601,463	34,050,234	7.49
	-	-	-
Jumlah	661,863,812	486,490,714.00	36.05

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp89.740.817 dan Rp95.563.509.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,09 persen dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan karena penurunan anggaran Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,778,000	12,323,600	(28.77)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,962,817	83,111,909	(2.59)
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	128,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	89,740,817	95,563,509	(6.09)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp963.645.018 dan Rp43.120.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.134,80 persen disebabkan oleh Kenaikan Realisasi biaya perjalanan dinas dikarenakan pada tahun 2022 ini sudah normal kembali berbeda pada tahun 2021 masih adanya pandemi covid 19 dan bersamaan juga dengan Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Perjalanan Biasa	541,448,087	40,370,000	1,241.21
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	126,550,000	1,450,000	8,627.59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	214,358,391	1,300,000	16,389.11
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	81,288,540	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	963,645,018.00	43,120,000	2,134.80

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 disebabkan oleh Tidak ada beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat baik tahun 2022 maupun tahun 2021. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Bantuan Sosial
Rp0*

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 0,00 disebabkan oleh Tidak ada beban bantuan sosial baik tahun 2022 maupun tahun 2021. Rincian Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp243.274.694*

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp243.274.694 dan Rp311.968.462.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	160,488,618	229,182,386	(29.97)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	82,786,076	82,786,076	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	243,274,694	311,968,462	(22.02)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	243,274,694	311,968,462	(22.02)

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0*

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp20.699.999

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.699.999 dan Rp9.099.999

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	20,699,999	9,099,999.00	127
	-	-	-
Jumlah	20,699,999.00	9,099,999	127

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp6.000.208

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.000.208 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	208	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	6,000,000	-	-
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	6,000,208.00	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

Tidak ada pendapatan PNPB 2021 dan 2022

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021	%
	-	-	-
	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Tidak ada di anggarkan dana untuk penanganan covid 19 karena sudah normal kembali

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.4.140.151.318,00 dan Rp.4.493.358.693,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.-4.497.568.096,00 dan Rp.-3.225.027.627,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-41.004.913 yaitu sebagai berikut .

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-41.004.913. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Tidak ada Ekuitas transaksi

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2022

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Ekuitas Awal
Rp4.140.151.318,00

Defisit LO Rp.-
4.497.568.096,00

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Rincian koreksi lain lain tidak ada baik tahun 2022 maupun tahun 2021. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2022

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.4.309.602.939 dan Rp.2.879.008.931. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2022

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	4,336,303,146
Diterima dari Entitas Lain	(26,700,207)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	4,309,602,939

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DKEL sebesar Rp 4.336.303.146, sedangkan DDEL sebesar Rp 26.700.207

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2022

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2022

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp3.952.186.161*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.952.186.161,00 dan Rp.4.106.335.084,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada permasalahan terkait neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan menu To Do Lis di Aplikasi Monsakti tidak terdapat notifikasi



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 656265
SAMPAI DENGAN PERIODE 2022-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,446,165,000	4,446,165,000	0
2	Belanja	4,336,303,189	4,336,303,189	0
3	Pengembalian Belanja	-43	-43	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	26,700,207	26,700,207	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-23



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 076010800KD **BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656265 **KPU KOTA PARIAMAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 01/02/23 3:36 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 01/02/23 2:30 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,553,254,262	2,279,782,441	273,471,821	11.996
Beban Persediaan	38,974,146	17,202,500	21,771,646	126.561
Beban Barang dan Jasa	625,262,349	452,440,480	172,821,869	38.198
Beban Pemeliharaan	89,740,817	95,563,509	(5,822,692)	(6.093)
Beban Perjalanan Dinas	963,645,018	43,120,000	920,525,018	2,134.798
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 076010800KD **BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656265 **KPU KOTA PARIAMAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 01/02/23 3:36 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 01/02/23 2:30 PM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	243,274,694	312,015,262	(68,740,568)	(22.031)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,514,151,286	3,200,124,192	1,314,027,094	41.062
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,514,151,286)	(3,200,124,192)	(1,314,027,094)	41.062
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	20,699,999	8,912,799	11,787,200	132.25
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	20,699,999	9,099,999	11,600,000	127.473
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	187,200	(187,200)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,000,208	0	6,000,208	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6,000,208	0	6,000,208	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	26,700,207	8,912,799	17,787,408	199.572
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,487,451,079)	(3,191,211,393)	(1,296,239,686)	40.619
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,487,451,079)	(3,191,211,393)	(1,296,239,686)	40.619

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : 0800 SUMATERA BARAT
 JENIS SATUAN KERJA : KD
 SATUAN KERJA : 656265 KPU KOTA PARIAMAN

Tgl Data : 01/02/23 2:31 PM
 Kode Lap : LPE.SATKER
 Tanggal : 01/02/23 3:36 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	4,140,151,318	4,493,358,693	(353,207,375)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,487,451,079)	(3,191,211,393)	(1,296,239,686)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(41,004,913)	41,004,913	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(41,004,913)	41,004,913	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,309,602,939	2,879,008,931	1,430,594,008	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(177,848,140)	(353,207,375)	175,359,235	-
EKUITAS AKHIR	3,962,303,178	4,140,151,318	(177,848,140)	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA PARIAMAN 656265

Waktu Olap: 2023-02-01 14:23:08.0 [B@685ab45d]
Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 01/02/23 3:37 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	26,700,207	26,700,207	0	0	9,099,999	9,099,999	0
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	26,700,207	26,700,207	0	0	9,099,999	9,099,999	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	2,595,677,000	2,553,254,262	(42,422,738)	98	2,298,244,000	2,279,782,441	18,461,559	99
	BELANJA BARANG	1,758,488,000	1,691,137,884	(67,350,116)	96	615,830,000	608,326,489	7,503,511	99
	BELANJA MODAL	92,000,000	91,911,000	(89,000)	100	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KOTA PARIAMAN 656265

Waktu Olap: 2023-02-01 14:23:08.0 [B@5e62feb3
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 01/02/23 3:37 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,446,165,000	4,336,303,146	(109,861,854)	98	2,914,074,000	2,888,108,930	25,965,070	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KDUAPPAW : 076010800KD BA(076) ES1(01) SUMATERA BARAT
 KODE SATKER : 656265 KPU KOTA PARIAMAN

Tgl Data 01/02/23 2:29 PM
 Tgl. Cetak 01/02/2023 3:38 PM
 lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	0	26,484,446	(26,484,446)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	0	26,484,446	(26,484,446)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	585,303,000	585,303,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	1,525,119,676	2,227,157,745	(702,038,069)	(31.52)
Gedung dan Bangunan	3,598,742,000	3,598,742,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,746,861,498)	(2,297,535,873)	550,674,375	(23.97)
JUMLAH ASET TETAP	3,962,303,178	4,113,666,872	(151,363,694)	(3.68)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	793,949,069	0	793,949,069	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(793,949,069)	0	(793,949,069)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	3,962,303,178	4,140,151,318	(177,848,140)	(4.30)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,962,303,178	4,140,151,318	(177,848,140)	(4.30)
JUMLAH EKUITAS	3,962,303,178	4,140,151,318	(177,848,140)	(4.30)
JUMLAH EKUITAS	3,962,303,178	4,140,151,318	(177,848,140)	(4.30)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,962,303,178	4,140,151,318	(177,848,140)	(4.30)

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
UNIT ORGANISASI : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656265 **KPU KOTA PARIAMAN**

Tgl Data 01/02/23 2:16 PM
Tgl. Cetak 01/02/2023 3:38 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	585,303,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,525,119,676	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,598,742,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,291,538,080
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	455,323,418
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	793,949,069	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	793,949,069
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,336,303,146
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	26,700,207	0
0.0	391111	Ekuitas	0	4,140,151,318
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	20,699,999
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	208
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	708,081,820	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,471	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54,512,342	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,817,410	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	53,280,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,713,813	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	51,635,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	118,688,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	27,060,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,730,500	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	715,723,446	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	22,336,100	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	239,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	18,220,825	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	38,342,086	0
3.0	521211	Beban Bahan	101,676,022	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	118,300,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	167,303,303	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	165,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	36,601,463	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	15,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	11,158,350	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,778,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,962,817	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076	KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : 01	KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0800	SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : 656265	KPU KOTA PARIAMAN

Tgl Data 01/02/23 2:16 PM

Tgl. Cetak 01/02/2023 3:38 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	541,448,087	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	126,550,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	214,358,391	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	81,288,540	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	160,488,618	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	82,786,076	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	12,489,700	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	26,484,446	0
JUMLAH			11,043,965,238	11,043,965,238

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
UNIT ORGANISASI : 01 **KOMISI PEMILIHAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 0800 **SUMATERA BARAT**
SATUAN KERJA : 656265 **KPU KOTA PARIAMAN**

Tgl Data 01/02/23 2:28 PM

Tgl. Cetak 01/02/2023 3:38 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagikan ke Entitas Lain	0	4,336,303,146
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	26,700,207	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	20,699,999
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	208
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	6,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	708,081,820	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,514	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	43
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	54,512,342	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,817,410	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	53,280,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,713,813	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	51,635,460	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	118,688,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	27,060,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	802,730,500	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	715,723,446	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	22,336,100	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	239,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	95,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18,220,825	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	38,342,086	0
3.0	521211	Belanja Bahan	101,676,022	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	118,300,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	167,303,303	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	165,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12,489,700	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	36,601,463	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	15,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	11,158,350	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,778,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,962,817	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	541,448,087	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	126,550,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	214,358,391	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	81,288,540	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,911,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 076
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0800
SATUAN KERJA : 656265

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SUMATERA BARAT
KPU KOTA PARIAMAN

Tgl Data 01/02/23 2:28 PM

Tgl. Cetak 01/02/2023 3:38 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			4,363,003,396	4,363,003,396